

PERANCANGAN MAL PELAYANAN PUBLIK TERPADU DI KABUPATEN BOMBANA DENGAN PENEKANAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR

Afdal Jaya Susvito¹, Dwi Ely Wardani², Lidi Wilaha³

^{1,2,3} Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta, Jalan
Raya Palur Km. 5 Surakarta 57772

afdaljaya212@gmail.com¹

ABSTRAK

Perancangan Kantor Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bombana dengan penekanan arsitektur Neo-Vernakular bertujuan untuk mewujudkan fasilitas pelayanan terpadu yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus merepresentasikan identitas budaya lokal. Metode perancangan meliputi survei lokasi, dokumentasi, studi literatur, analisis tapak, dan pengolahan data untuk menghasilkan konsep desain yang fungsional, estetis, dan kontekstual. Bentuk massa bangunan terinspirasi dari rumah adat Moronene, dengan penyesuaian proporsi serta penambahan elemen khas seperti tonto (kaki), botono (badan), dan pea (kepala) sebagai representasi struktur bangunan yang kokoh dan bermakna. Hasil perancangan diharapkan menjadi pusat pelayanan yang efisien, nyaman, mudah diakses, serta menjadi simbol kemajuan daerah yang tetap menghargai warisan budaya setempat.

Kata kunci: Mal Pelayanan Publik; Arsitektur Neo-Vernakular; Rumah Adat Moronene

ABSTRACT

The design of the Public Service Mall Office in Bombana Regency, with an emphasis on Neo-Vernacular architecture, aims to create an integrated service facility capable of improving the quality of public services while representing the local cultural identity. The design method includes site surveys, documentation, literature studies, site analysis, and data processing to produce a functional, aesthetic, and contextual design concept. The building mass form is inspired by the traditional Moronene house, with adjusted proportions and the addition of distinctive elements such as tonto (legs), botono (body), and pea (head) as representations of a solid and meaningful building structure. The design outcome is expected to serve as an efficient, comfortable, and easily accessible service center, as well as a symbol of regional progress that respects and preserves local cultural heritage.

Keywords: Public Service Mall; Neo-Vernacular Architecture; Moronene Traditional House

PENDAHULUAN

Kabupaten Bombana adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai wilayah berpenduduk asli suku Moronene (Hamasi Jarsul A. et al., 2002). Pada abad ke-17, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Moronene, salah satu etnik tertua di daratan besar Sulawesi Tenggara (Hamasi Jarsul A. et al., 2002). Kabupaten Bombana berdiri pertama kali pada tahun 2003 dengan 6 kecamatan, dan pada tahun 2020 telah berkembang menjadi 22 kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 22 kelurahan (BPS Kabupaten Bombana, 2021).

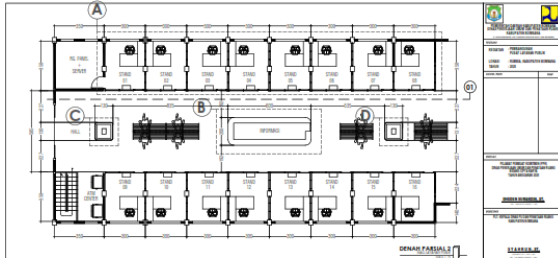
Seiring perkembangan zaman, masyarakat Kabupaten Bombana semakin membutuhkan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pemenuhan kebutuhan primer dan penunjang hidup lainnya, terutama di bidang

sarana dan prasarana pelayanan masyarakat (Riyadi Kharisma, 2021). Dalam konteks nasional, pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menekankan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses (Republik Indonesia, 2009).

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang mendorong setiap daerah membentuk pusat layanan terpadu dalam satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2021).

Kabupaten Bombana merespons kebijakan ini dengan mendirikan MPP yang berlokasi di Kecamatan Rumbia, Kelurahan Kasipute. Berdasarkan observasi dan survei,

MPP saat ini berupa gedung bekas serbaguna yang dialihfungsikan menjadi kantor pelayanan publik. Namun, gedung tersebut memiliki keterbatasan kapasitas dan fasilitas penunjang, serta tata letak ruang tunggu pelayanan yang terbatas sekitar 40 m², sehingga menurunkan kenyamanan dan efisiensi layanan (BPS Kabupaten Bombana, 2021).



Gambar 1. Eksisting Denah MPP Kabupaten Bombana
Sumber: Penulis 2025



Gambar 2. Kondisi Bangunan Gedung Serba Guna Sebelum dialihfungsikan menjadi Kantor Mal Pelayanan Publik
(Sumber: Penulis, 2025)

Kondisi eksisting kantor Mal Pelayanan Publik di Kecamatan Rumbia, Kelurahan Kasipute, merupakan gedung bekas serbaguna yang direnovasi dengan material ACP (*Aluminium Composite Panel*) pada fasad depan dan samping kiri dengan motif khas Bombana.



Gambar 3. Kondisi eksisting Kantor Mal Pelayanan Publik Kec. Rumbia, Kelurahan Kasipute, Kabupaten Bombana
(Sumber: Penulis, 2025)

Berdasarkan pemaparan MPP Kabupaten Bombana (2021), kantor ini sudah menampung 14 instansi dan layanan, antara lain Polres Bombana, KP2KP Pratama Kolaka,

Pertanahan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinkes, BKD, Nakertrans dan Dinsos, Disperindakop & UKM, PT. Taspen, serta Bank Sultra (MPP Kab. Bombana, 2021).

Permasalahan utama adalah tersebarnya lokasi kantor pemerintahan di Kabupaten Bombana, sehingga masyarakat dan pegawai harus berpindah-pindah untuk menyelesaikan satu urusan administrasi, bertentangan dengan prinsip pelayanan satu atap MPP. Oleh karena itu, diperlukan perancangan ulang MPP yang terpusat, representatif, dan sesuai standar pelayanan modern, dengan lokasi strategis di pusat Kota Kabupaten Bombana, khususnya di Kecamatan Rumbia, berdasarkan pertimbangan desain dan RDTR Perkotaan Rumbia.



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Bombana, Lokasi Kec. Rumbia, Kab. Bombana, dan rencana lokasi baru
(Sumber: Penulis, 2025)

Rekomendasi Kementerian PAN-RB menekankan perlunya perbaikan tata letak bangunan dan ruang MPP Bombana agar lebih terbuka, nyaman, dan mendukung pelayanan berbasis digital, sekaligus menjadikan Bombana sebagai model MPP di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, direncanakan pembangunan MPP baru yang memenuhi standar teknis dan operasional serta mencerminkan identitas lokal melalui pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular, yang mengintegrasikan prinsip modernitas dengan nilai budaya lokal, bentuk tradisional, material lokal, dan orientasi iklim (Indra Yudha Pamungkas & Bintarjo, 2022).

Pendekatan ini diharapkan menghasilkan bangunan fungsional sekaligus menjadi simbol identitas budaya Moronene dan narasi ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga MPP Kabupaten Bombana dapat memberikan pelayanan publik terintegrasi, efisien, dan berkarakter lokal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Mall Pelayanan Publik

1. Latar Belakang Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik (MPP) dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2017 (Pemerintah Indonesia, 2017) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. MPP mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu atap untuk mengoptimalkan kinerja antar lembaga dan mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi (Shintania, dkk., 2012; Indriani & Pamungkas, 2020; Rasidi, 2019 dalam Agus La Ode Muhamad et al., 2022).

2. Pengertian dan Ciri-ciri MPP

MPP atau Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah pusat layanan yang menyelenggarakan perizinan dan non-perizinan secara terpadu di satu lokasi, sehingga pemohon hanya bertemu petugas front office dan mengurangi risiko pungutan liar (Publik, Suherlan, & Budhiono, 1997 dalam Sari, 2022). Ciri-ciri MPP antara lain pelayanan sistematis, cepat, mudah, aman, nyaman, prima, efektif, serta penggunaan lahan yang optimal (Setiawan, 2021; Munir, 2017 dalam Agus La Ode Muhamad et al., 2022).

3. Penyelenggaraan dan Tahapan MPP

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu, mencakup pelayanan perizinan dan non-perizinan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan swasta. Tahapan MPP meliputi koordinasi antar instansi, pengaturan mekanisme kerja, kelembagaan, dan proses bisnis (Perkemempnan RB No. 23 Tahun 2017).

4. Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017

Peraturan ini menjelaskan bahwa MPP adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan administrasi dengan pola terpadu satu atap maupun satu pintu. Penyelenggara meliputi institusi negara, korporasi, lembaga independen, dan badan hukum lain yang khusus menangani pelayanan publik. Pola ini bertujuan menyediakan layanan yang cepat, mudah, aman, nyaman, serta

mendukung pelayanan BUMN, BUMD, dan swasta.

5. Instansi yang Tergabung dalam MPP Kabupaten Bombana






Instansi yang tergabung meliputi:

- a. Pemerintah Daerah: DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pendapatan Daerah, SAMSAT, BPOM, Dinas Sosial, BKD, Disperindakop, PU, Dinkes.
- b. Kementerian/Lembaga: Kantor Pajak, Kemenag, Pengadilan Negeri, Dinas Pertanahan, SPKT Polres, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kejaksaan, PT PLN.
- c. BUMD: PDAM, Bank Sultra.
- d. Perbankan: BRI, BNI, Muamalat, Taspen.

6. Sirkulasi Mal Pelayanan Publik (MPP)

Pola sirkulasi ruang adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur ruang pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang untuk dipergunakan. Pola sirkulasi dapat dibagi menjadi 5, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (Pynkyawati et al., 2014).

Tabel 1. Jenis Pola Sirkulasi

Jenis Sirkulasi	Keterangan
 1.Radial	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Radial</i> : Konfigurasi Radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari sebuah pusat bersama. 2. <i>Network (Jaringan)</i> : Konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. 3. <i>Linier</i> : Jalan yg lurus dapat menjadi unsur pengorganisir utama deretan ruang. 4. <i>Grid</i> : Konfigurasi Grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. 5. <i>Spiral (Berputar)</i> : Konfigurasi Spiral memiliki suatu jalan tunggal menerus yang berasal dari titik pusat, mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah.
 2.Network	
 3.Linier	
 4.Grid	
 5.Spiral	

(Sumber: Pynkyawati et al., 2014)

Teori Arsitektur Neo-Vernakular

1. Definisi Arsitektur Neo-Vernakular

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan perpaduan antara arsitektur vernakular tradisional dan konsep modern (Saidi et al., 2019 dalam Nur'asia & Anisa, 2024; Widi & Prayogi, 2020). Istilah "Neo" berarti baru, sedangkan "Vernakular" merujuk pada arsitektur asli daerah yang dibangun masyarakat setempat dengan bahan lokal dan unsur budaya/adat (Purnomo, 2017 dalam Widi & Prayogi, 2020). Konsep ini berkembang dari aliran postmodern yang mengkritisi arsitektur modern yang monoton, dengan tujuan menghadirkan bangunan yang

fungsional, estetis, dan kontekstual terhadap budaya serta lingkungan setempat (Makassar *et al.*, 2013 dalam Widi & Prayogi, 2020; Fasilitas & Dan, n.d. dalam Widi & Prayogi, 2020).

2. Kriteria Arsitektur Neo-Vernakular

Menurut (Aldin Fatih, A. Hadi Prabowo, 2019 dalam Nur'asia & Anisa, 2024) terdapat beberapa kriteria arsitektur Neo Vernakular, yaitu:

- a. Bentuk-bentuk arsitektur ini menciptakan ekspresi unsur budaya dan lingkungan, termasuk iklim setempat, yang tercermin dalam komponen fisiknya seperti tata letak denah, detail, struktur, dan ornament bangunan.
- b. Karya yang dihasilkan oleh bangunan ini tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip arsitektur vernakular, tetapi lebih menekankan penciptaan karya baru dengan fokus utama pada estetika visualnya.
- c. Tidak hanya mengadopsi elemen fisik dalam bentuk modern, namun juga memasukkan elemen non-fisik seperti pola pikir budaya, kepercayaan, dan tata letak yang merujuk pada makrokosmos dan faktor-faktor lainnya.

3. Prinsip-Prinsip Arsitektur Neo-Vernakular

Prinsip-prinsip dari arsitektur neo-vernakular adalah sebagai berikut: (Putri Jaya Betari *et al.*, 2021). Arsitektur Neo-Vernakular memiliki beberapa dimensi hubungan:

- a. Langsung, selaras dengan nilai dan fungsi bangunan saat ini;
- b. Abstrak, melalui analisis tradisi budaya dan arsitektur peninggalan;
- c. Landscape, diterapkan pada lingkungan sekitar termasuk topografi dan iklim;
- d. Kontemporer, mengintegrasikan teknologi agar bentuk bangunan relevan dengan konsep arsitektur; dan
- e. Masa depan, mempertimbangkan kondisi untukantisipasi di masa mendatang.

4. Ciri-Ciri Arsitektur Neo-Vernakular

Menurut (Widi dan prayogi, 2020 dalam Nur'asia & Anisa, 2024) ada enam aliran yang muncul pada masa arsitektur post modern yang dinamakan arsitektur Neo Vernakular dan aliran ini memiliki ciri dalam arsitektur diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyertakan unsur komunikatif dengan karakter populer.
- b. Menghidupkan kembali ingatan historis

- c. Berada dalam konteks urban
- d. Menggunakan kembali teknik ornamentasi
- e. Bersifat representatif (menyatakan secara keseluruhan).
- f. Memiliki bentuk metaforis (dapat melambangkan bentuk lain).
- g. Dihasilkan melalui keterlibatan partisipatif
- h. Mencerminkan aspirasi Bersama.
- i. Bersifat beragam.
- j. Bersifat eklektik.

5. Arsitektur Vernakular Tolaki

Berikut ini merupakan suatu karya arsitektur yang menerapkan konsep arsitektur neo vernakular, sebagai berikut.

- a. Kantor Bupati Sijunjung



Gambar 5. Kantor Bupati Sijunjung
(Sumber: Putri Jaya Betari *et al.*, 2021)

Konsep arsitektur neo-vernakular yang terkandung Bangunan kantor bupati di Sijunjung Sumatera Barat yang dirancang oleh arsitek Yuswir Rifin. Bangunan kantor bupati ini terdiri dari 4 lantai. Bangunan ini menggunakan konsep arsitektur Neo Vernakular, hal ini dapat terlihat pada bagian atap bangunan yang menggunakan atap bumbungan dan implementasi dari bentuk atap Gonjong yang melengkung dan runcing ke atas merupakan simbol identitas dari Sumatera Barat. Selain bentuk atap, nilai nilai Neo Vernakular yang diterapkan pada kantor bupati ini adalah bentuk fasad yang pada sisi kiri dan kanan gedung diimplementasikan dari salah satu motif batik Sumatera Barat.

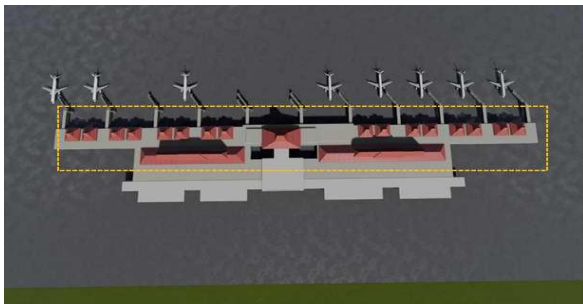
- b. Bandar udara Soekarno Hatta

Gambar 6 menunjukkan bahwa selain mengadopsi bentuk bangunan dari rumah suku Badui yang diterapkan pada massa utamanya, bangunan bandar udara ini juga menggunakan bentuk atap lokal dengan penggunaan atap joglo dan bangunan mengadopsi bentuk pendopo yang di terapkan pada masa bangunan lainnya yang berfungsi sebagai ruang tunggu keberangkatan pada bandara udara ini.



Gambar 6. Bentuk bangunan Bandara Udara Soekarno Hatta
(Sumber: Goldra & Prayogi, 2021)

c. Bandar udara Juanda



Gambar 7. Bentuk Bangunan Bandara Udara Juanda
(Sumber: Goldra & Prayogi, 2021)

Pada studi kasus Bandara Udara Juanda pada atapnya menggunakan atap bubungan, namun tidak seluruh bangunannya ditutupi dengan atap bubungan, terlihat bahwa selain atap bubungan bangunan ini juga menggunakan atap dak untuk menutupi bangunannya, terlihat bahwa atap dak dengan atap bubungan pada bangunan ini sama-sama mendominasi dengan atap dak menutupi bangunan sekitar 60% dan atap bubungan sekitar 40% (Goldra & Prayogi, 2021).

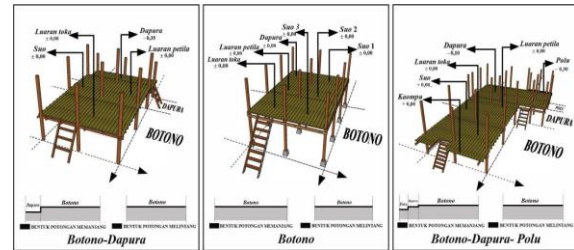
6. Arsitektur Tradisional Moronene

Rumah adat Moronene memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsi: raha (untuk raja/bangsawan), laica (masyarakat umum), bantea (tempat tinggal sementara di ladang), olompu (pondok istirahat di ladang), dan pombulu (pondok di atas pohon) (Moronene Heritages and Legacies, 2020 dalam Hamasi Jarsul A. et al., 2002). Secara konstruksi, rumah panggung ini dibangun permanen (laica ntinii) menggunakan kayu balok dan pasak, atau tidak permanen (laica nkinoko) menggunakan bambu/kayu dengan tali simpul mati.

a. Karakteristik Rumah Adat Moronene:

1) Sistem Spasial dan Ruang.

Rumah terdiri dari kaompu (teras depan), toka (ruang tamu), petila (ruang keluarga), suo (ruang tidur), dan dapura (dapur) (Hamasi Jarsul A. et al., 2002).



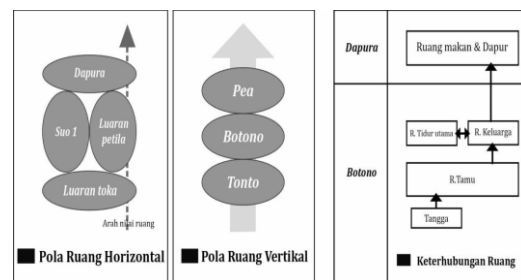
Gambar 8. Konfigurasi Ruang
(Sumber: Hamasi Jarsul A. et al., 2002)

2) Orientasi.

Arah hadap rumah berbeda berdasarkan perkampungan (tobu), misalnya padatobu laea menghadap ke semua mata angin, sedangkan tobu hukaea menghadap Timur dan Barat (Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

3) Pola Hirarki dan Hubungan Ruang.

Terdapat perbedaan ketinggian lantai, dengan botono (rumah inti) sebagai ruang suci, sedangkan dapura dianggap tidak suci. Secara vertikal, rumah tersusun dari tonto (kaki), botono (badan), dan pea (kepala), mencerminkan simbol tubuh manusia, mirip dengan rumah tradisional Buton (Kadir, 2008 dalam Hamasi Jarsul A. et al., 2002).



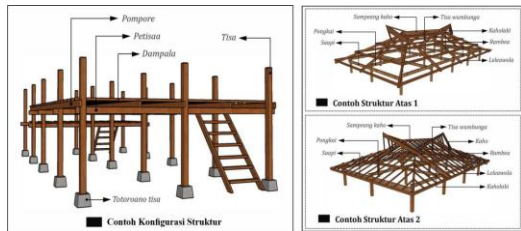
Gambar 9. Pola Hirarki dan Hubungan Ruang
(Sumber: Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

b. Sistem Fisik Rumah Adat Moronene

1) Konfigurasi Struktur.

Rumah adat Moronene dibangun menggunakan kayu jati sebagai material utama, dengan struktur rangka yang terdiri dari totoroano tisa (umpak), tisa (tiang), powatako (balok induk), pompole (balok memanjang), dan dampala (penopang lantai) (Hamasi Jarsul A. et al., 2002). Struktur atas rumah memiliki balok dan tiang yang tersusun membentuk rangka atap, dengan

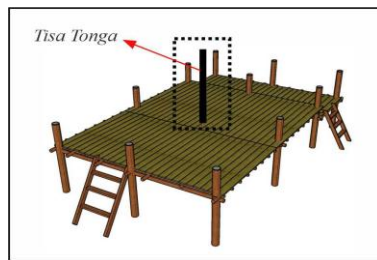
variasi tambahan kaho (usuk/kasau) sebagai tempat penopang atap rumbia.



Gambar 10. Konfigurasi Sistem Struktur (Sumber : Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

2) Tiang Utama (tisa tonga).

Tiang pertama yang didirikan saat pembangunan rumah, dipasang setelah ritual adat mekilala. Tiang ini menggunakan kayu utuh mengikuti arah tumbuh pohon, dan diletakkan pada bagian botono dengan pola tertentu yang mirip dengan rumah tradisional Buton (Kadir, Umar, & Hasan, 2017).

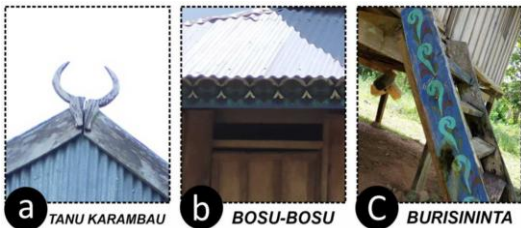


Gambar 11. Contoh Perletakan Tiang Utama (tisa tonga) (Sumber : Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

c. Sistem Elemen Bangunan

1) Ragam Hias

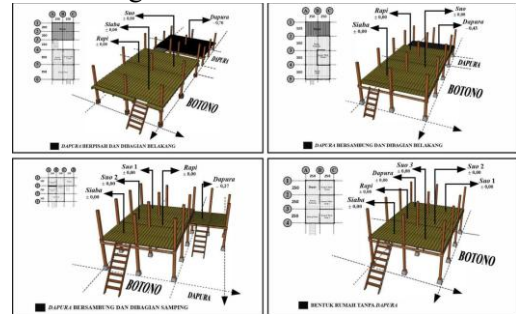
Ragam hias yang ditemukan pada sampel rumah masyarakat Moronene adalah tanu karambau, bosu-bosu, dan burisininta. Ragam hias tanu karambau (tanduk kerbau) letaknya berada pada puncak atap rumah dan terbuat dari kayu. Ragam hias bosu-bosu dan burisininta yang berupa motif to Moronene. Motif bosu-bosu dan burisininta terdiri dari 5 warna yaitu kuning, merah, biru, hitam dan putih.



Gambar 12. Ragam Hias (Sumber : Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

2) Bentuk Arsitektur Rumah Moronene

a) Bentuk rumah berdasarkan bentuk denah terbagi menjadi empat bentuk sebagai berikut :



Gambar 13. Bentuk Rumah Berdasarkan Denah (Sumber : Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

b) Bentuk rumah berdasarkan bentuk denah terbagi menjadi dua bentuk sebagai berikut :



Gambar 14. Bentuk Rumah Berdasarkan Fasad (Sumber : Hamasi Jarsul A. et al., 2002).

Kabupaten Bombana

Kabupaten Bombana terletak di bagian selatan Sulawesi Tenggara, membentang ±180 km dari utara ke selatan dan ±154 km dari barat ke timur (BPS Kabupaten Bombana, 2021). Posisi strategisnya menghubungkan jalur darat lintas selatan, barat Sulawesi, dan jalur perdagangan laut timur-barat Indonesia. Luas daratan sekitar 3.316,16 km², sementara perairan laut ±11.837,31 km². Saat ini, Kabupaten Bombana terbagi menjadi 22 kecamatan, termasuk wilayah daratan dan kepulauan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bombana pada tahun 2020 tercatat 150.705 jiwa, dengan rasio jenis kelamin menunjukkan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan (BPS Kabupaten Bombana, 2021). Kepadatan penduduk menurun menjadi 45,5 jiwa/km² pada tahun 2020, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Poleang dan Rumbia, dan terendah di Kecamatan Matausu.

Rata-rata hari hujan di Kabupaten Bombana pada tahun 2020 tercatat 150 hari, meningkat dari 88 hari pada tahun sebelumnya, dengan curah hujan rata-rata 1.607,6 mm. Bulan Maret memiliki intensitas hujan tertinggi, mencapai 27 hari (BPS Kabupaten Bombana, 2021).

METODE PENELITIAN

1. Obyek Perancangan

Obyek penelitian ini adalah Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana, yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memfasilitasi berbagai instansi pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu lokasi. Desain MPP mengadopsi pendekatan arsitektur Neo-Vernakular, yang mengintegrasikan unsur budaya lokal masyarakat Moronene dengan konsep modern, sehingga menghasilkan ruang yang fungsional, estetis, dan kontekstual.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Observasi.

Pengamatan langsung ke lokasi perancangan untuk memahami kondisi fisik tapak, lingkungan, aksesibilitas, dan potensi pengembangan.

2) Dokumentasi.

Pengumpulan data visual berupa foto, video, dan peta lokasi untuk mendukung analisis dan perancangan.

3) Wawancara.

Proses tanya jawab secara langsung dengan masyarakat atau pihak terkait, untuk memperoleh informasi yang mendukung desain MPP.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari literatur, jurnal, dokumen perencanaan daerah, regulasi pemerintah, dan referensi desain MPP serupa.

c. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mendukung proses perancangan.

3. Prosedur Perancangan

1) Analisis Aktivitas.

Mengidentifikasi jenis pelayanan, kebutuhan pengguna, dan pola aktivitas di MPP.

2) Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang.

Menentukan kebutuhan ruang berdasarkan fungsi, jumlah pengguna, dan standar ruang.

3) Analisis Pemilihan Site.

Mengevaluasi alternatif lokasi berdasarkan aksesibilitas, potensi pengembangan, dan kesesuaian regulasi tata ruang.

4) Analisis Tapak.

Menentukan orientasi, sirkulasi, zoning, view, pencahayaan, dan kebisingan untuk program tapak yang optimal.

5) Analisis Tampilan Bangunan.

Mengeksplorasi gaya arsitektur Neo-Vernakular dan elemen tradisional dalam bentuk modern.

6) Analisis Bahan Bangunan.

Menentukan material yang mendukung keberlanjutan, ketersediaan lokal, dan estetika arsitektur.

7) Analisis Struktur.

Merancang sistem struktur yang aman dan efisien sesuai desain MPP.

8) Analisis Utilitas.

Mengkaji sistem listrik, air bersih, drainase, ventilasi, dan pembuangan limbah untuk kenyamanan pengguna.

HASIL DAN ANALISIS

Konsep Ruang

1. Pelaku Aktivitas

Perancangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana melibatkan empat kelompok pelaku utama:

a. Pengelola

Bertanggung jawab atas operasional dan manajemen gedung, meliputi kepala pengelola, staff administrasi, IT, humas, dan divisi LPSE.

b. Instansi Tergabung

Terdiri dari 11 instansi pelayanan publik: DPM-PTSP, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda, Samsat, KPP Pratama, Ketenagakerjaan, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Agama, Pertanahan, Polres (SPKT), BUMN, Perbankan, serta Notaris dan PPAT.

c. Pengunjung/Masyarakat

Pengguna layanan publik yang mengakses berbagai jenis pelayanan administratif dan perizinan.

d. Petugas Servis

Meliputi keamanan, kebersihan, teknisi mekanikal-elektrikal, dan petugas pendukung operasional gedung.

2. Pola Aktivitas Pelaku

Analisis pola aktivitas dilakukan untuk mengoptimalkan zonasi, sirkulasi, dan pengendalian akses:

- 1) Pengunjung: Alur terarah dari area publik ke semi-publik dalam waktu terbatas
- 2) Pegawai dan Pengelola: Pola kompleks sepanjang hari kerja dengan akses ke area privat
- 3) Petugas Servis: Mobilitas teknis mendukung sistem operasional bangunan

3. Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang dikategorikan berdasarkan sifat dan fungsi:

1) Ruang Publik (16 jenis)

Lobby, ruang pelayanan, kantin, ruang bermain anak, *foto copy*, toilet pengunjung, perpustakaan, museum, mushola, ruang informasi, dan lain-lain.

2) Ruang Semi-Publik (6 jenis)

Tempat penitipan anak, ruang laktasi, ruang foto dan pengambilan data, ruang poli klinik, aula serbaguna, ruang pelayanan internal.

3) Ruang Privat (27 jenis)

Ruang kepala pengelola, ruang rapat, kantor instansi, ruang arsip, ruang server, ruang kerja staff, ruang manager, dan lain-lain.

4) Ruang Servis (15 jenis)

Ruang CCTV, genset, pompa air, ME, AHU, trafo, gudang, ruang petugas kebersihan dan keamanan, dan lain-lain.

4. Besaran Ruang

Perhitungan besaran ruang mengacu pada standar NAD, Permen PU, Bappenas, TSS, dengan rincian:

Tabel 2. Rekapitan Luasan Bangunan

Nama	Luas
Kelompok ruang pengelola	921,193 m ²
Kelompok ruang pelayanan	1.462,76 m ²
Kelompok ruang penunjang	1.179,4 m ²
Kelompok ruang servis	459,6 m ²
Kelompok ruang luar	1.537,146 m ²
Total	1.537,146 m ²

(Sumber: Analisis Pribadi, 2025)

Data Intensitas Pemanfaatan Ruang:

- a. Luas Site: 21.546 m² (2 ha)
- b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maks. (40%): 21.546 m² × 40% = 8.618,4 m²

c. Luas Terbangun Aktual: 5.336,47 m²

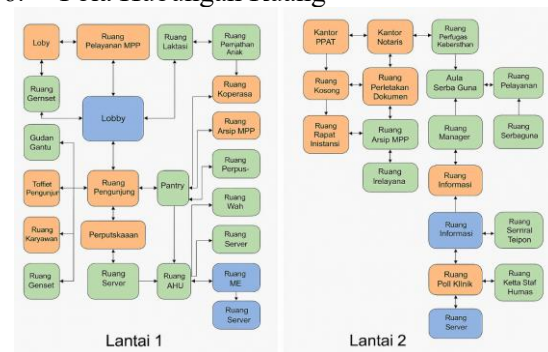
d. Kesimpulan: Luas terbangun aktual (5.336,47 m²) berada di bawah batas KDB (8.618,4 m²), menyisakan lahan tak terbangun sebesar 16.209,53 m² untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas luar lainnya, yang memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 60%.

5. Zonasi Ruang

Pembagian zona berdasarkan tingkat aksesibilitas:

- a. Publik, Akses bebas untuk semua. Lobby, Area Loker Pelayanan, Kantin, Toilet Pengunjung, Mushola.
- b. Semi-Publik, Akses terbatas, umumnya untuk interaksi antara pegawai/pengelola dan pengunjung. Ruang Informasi, Ruang Rapat Staf MPP, Ruang Pelayanan MPP (layanan teknis), Ruang Tamu Kepala Pengelola.
- c. Privat, Akses terbatas untuk pelaku tertentu (pegawai, pengelola). Ruang Kerja Kepala Pengelola, Ruang Arsip, Ruang Rapat, Ruang Manager.
- d. Servis, Akses terbatas untuk petugas servis dan teknisi. Ruang Genset, Ruang Panel Listrik, Ruang Pompa Air, Gudang, Ruang CCTV.

6. Pola Hubungan Ruang



Gambar 15. Pola Hubungan Ruang (Sumber: Analisis Pribadi, 2025)

Konsep Site

1. Lokasi Site

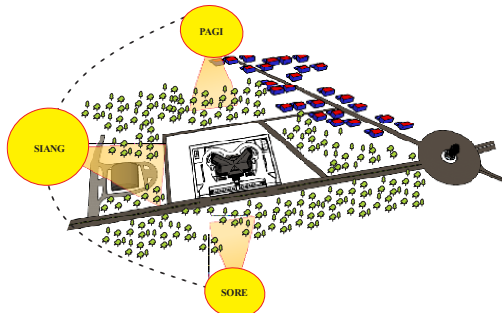
Lokasi Perancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bombana terletak di JL. Yos Sudarso, Kel. Lampopala, Rumbia, Kabupaten Bombana, luas site yakni 29.000 m² atau 2,9 Ha. Pengukuran luasan lahan menggunakan *Google Earth*.



Gambar 16. Lokasi Site
(Sumber: Analisis Pribadi, 2025)

Lokasi site berada pada zona Pelayanan Umum Sebagaimana di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, Pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Rumbia.

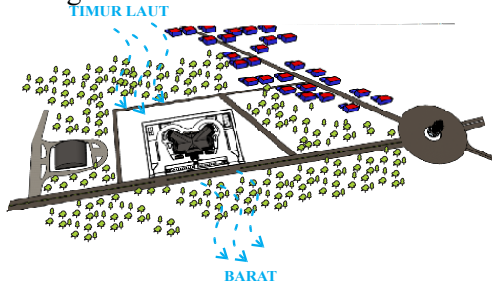
2. Orientasi Matahari



Gambar 17. Orientasi Matahari
(Sumber: Penulis, 2025)

Analisis Pergerakan matahari sepanjang tahun untuk mengetahui orientasi bangunan yang tepat sehingga memaksimalkan pencahayaan yang masuk kedalam bangunan, Berdasarkan kondisi eksisting posisi matahari di Sulawesi Tenggara bervariasi sepanjang tahun, bergerak dari selatan ke utara khatulistiwa dan kembali lagi, mempengaruhi lamanya siang dan malam hari. Orientasi bangunan di buat menghadap ke arah barat yang merupakan jalan utama.

3. Angin

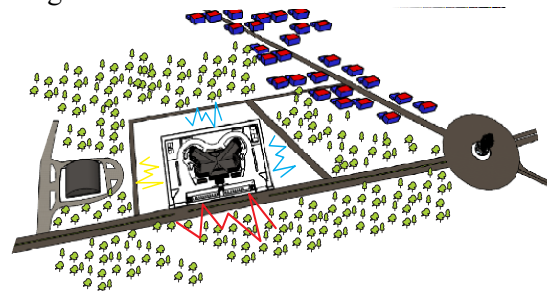


Gambar 18. Arah Angin
(Sumber: Penulis, 2025)

Kecepatan angin tertinggi di wilayah ini sebesar 10,5 m/s yang terjadi pada bulan Januari dan Desember 2020. Untuk rata-rata kecepatan angin di wilayah ini berkisar antara 0,5 – 2,1 m/s.

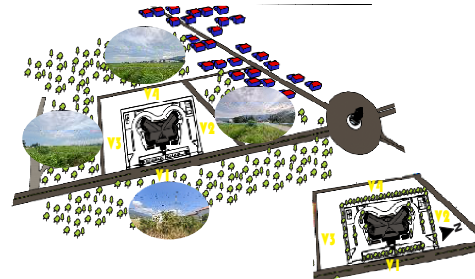
4. Kebisingan

Analisis kebisingan di lakukan untuk mengetahui sumber kebisingan dan tingkat kebisingan di sekitar tapak yang dapat berpengaruh pada tapak dan bangunan sehingga dalam perencanaannya dapat di temukan solusi dan upaya untuk mengatasi masalah kebisingan dalam tapak yang dapat berpengaruh pada kenyamanan pengguna dalam bangunan. Tingkat kebisingan tertinggi berada pada arah barat site yaitu pada jalan raya, kebisingan ini dapat mengganggu kenyamanan dalam bangunan.



Gambar 19. Kebisingan
(Sumber: Penulis, 2025)

5. View Kedalam Site



Gambar 20. View Dalam Tapak
(Sumber: Penulis, 2025)

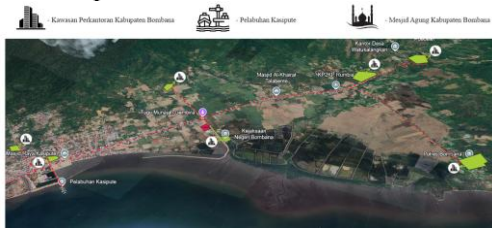
6. View Ke luar Tapak

Tampak Kearah luar tapak arah Utara Terlihat Tugu Munajah dan rumah warga, pada arah Selatan terlihat Gedung olahraga dan juga beberapa kantor pemerintahan, kemudian pada area barat terlihat persawahan, serta di arah timur pada tapak terlihat persawahan, sekolah dan rumah warga di sekitar tapak.



Gambar 21. View Luar Tapak
(Sumber: Penulis, 2025)

7. Pencapaian Site

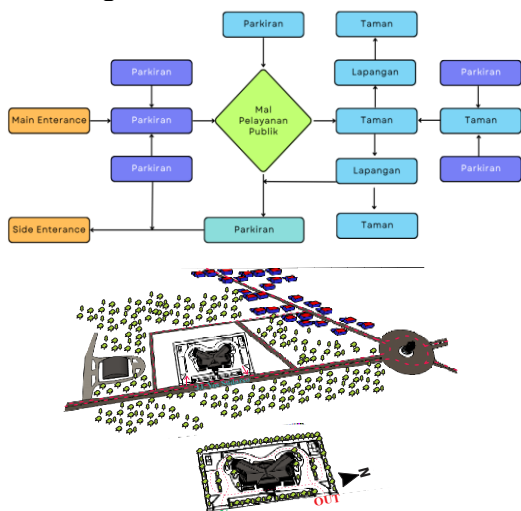


Gambar 22. Pencapaian Site (Sumber: Penulis, 2025)

Berdasarkan gambar di atas, pada site yang berwarna Merah berada di tengah tengah daerah Rumbia dan kawasan perkantoran berwarna hijau yang tempatnya berbeda beda, dengan Masing masing jarak ke site dari kawasan perkantoran yang berbeda kurang lebih menempuh waktu kurang lebih 15 menit.

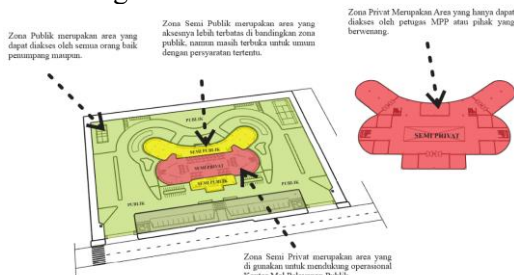
8. Sirkulasi

Analisis aksesibilitas dan sirkulasi pada tapak untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pengguna. Analisis ini membantu dalam menentukan sirkulasi yang efektif dan memastikan bahwa pengguna dapat mengakses lokasi dengan mudah dan aman.



Gambar 23. Sirkulasi (Sumber: Penulis, 2025)

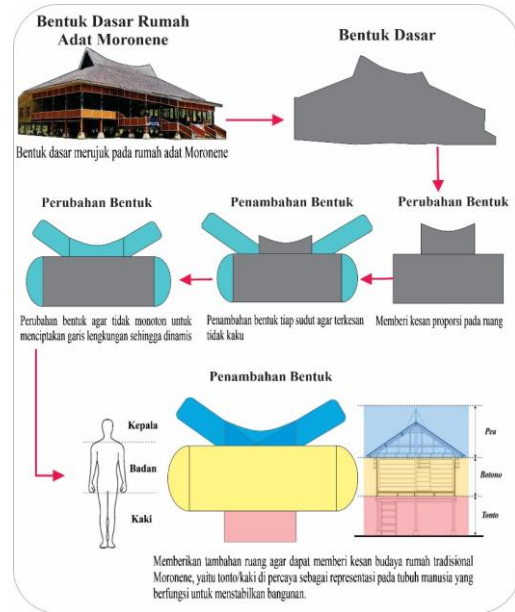
9. Penzonangan



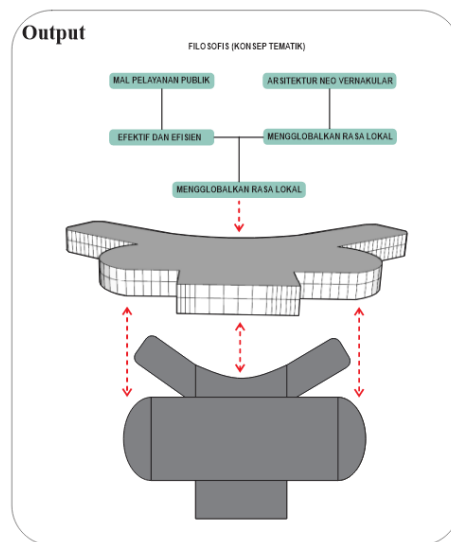
Gambar 24. Penzonangan (Sumber: Penulis 2025)

Bentuk Bangunan

1. Transformasi Bentuk

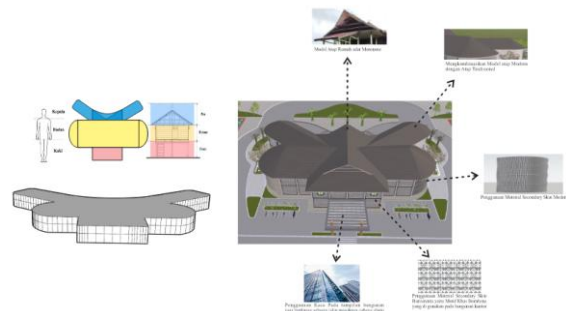


Gambar 25. Transformasi Bentuk (Sumber: Penulis, 2025)



Gambar 26. Output Bentuk (Sumber: Penulis, 2025)

2. Tampilan Bangunan



Gambar 27. Bentuk Tampilan Bangunan (Sumber: Penulis, 2025)

3. Bahan Bangunan

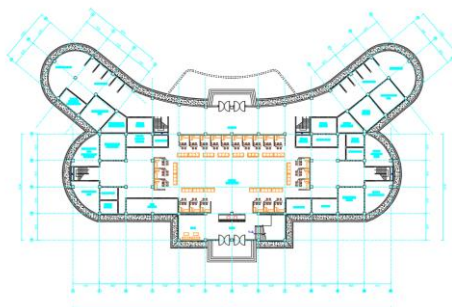
Untuk kebutuhan struktur utama, material yang digunakan meliputi Besi Tulangan, Semen, Pasir, dan Batu Split sebagai komponen utama beton. Selain itu, Baja WF dipilih untuk mendukung struktur bentangan lebar, khususnya pada area yang membutuhkan kolom minimal. Pondasi dan pekerjaan awal juga akan melibatkan Batu Kali.

Pada bagian dinding dan partisi, digunakan bata ringan sebagai material pengisi dinding yang efisien. Sementara untuk penutup langit-langit, digunakan Gypsum Board yang fleksibel dan memiliki bobot ringan.

Lantai ruang pelayanan dan publik akan menggunakan keramik lantai, sementara vinyl dapat digunakan di area tertentu yang membutuhkan kehangatan atau kenyamanan lebih. Fasad bangunan akan diperkuat dengan sentuhan modern menggunakan ACP (*Aluminium Composite Panel*). Elemen pelindung tambahan seperti *secondary screen* juga dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi energi dan estetika. Jendela dan pintu akan memanfaatkan Kaca *Tempered* dan Aluminium, sementara itu, untuk interior, HPL (*High Pressure Laminate*) akan digunakan sebagai lapisan finishing pada perabot atau panel dinding. Material Spandek dipilih sebagai penutup atap yang ringan dan tahan cuaca.

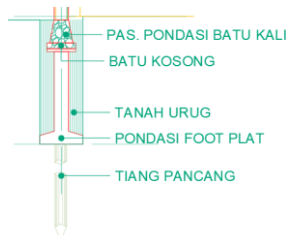
4. Struktur Bangunan

a. Modul



Gambar 28. Sistem Struktur Modul
(Sumber: Penulis 2025)

b. Sub Struktur



Gambar 29. Sub Struktur
(Sumber: Penulis 2025)

c. Upper Struktur



Gambar 30. Upper Struktur Rangka Baja
(Sumber: Penulis 2025)

Sistem Penghawaan Bangunan

1. Penghawaan Alami

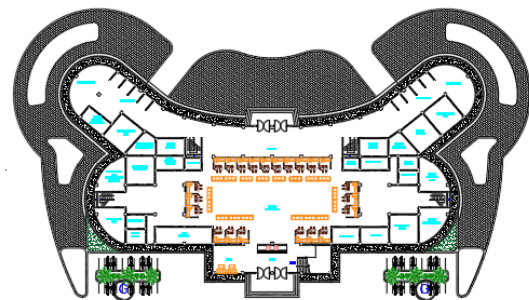
Penghawaan alami didominasi dengan menggunakan bukaan-bukaan vertikal yang ada pada bangunan, serta mengatur lokasi bukaan. Skema penghawaan alami disesuaikan dengan tanggapan terhadap arah angin pada konsep Analisis tapak.



Gambar 31. Penghawaan Alami
(Sumber: Penulis 2025)

2. Penghawaan Buatan

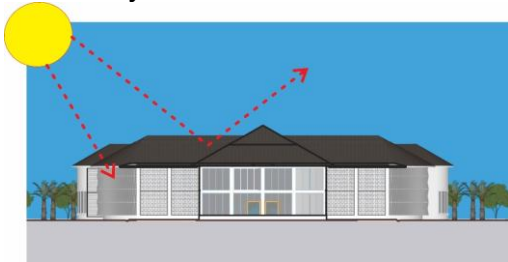
Penggunaan AC central pada fasilitas yang tergolong open- space tergolong efektif karena arahnya menyebar atau ruang yang sifatnya public dan besarnya termasuk luas Seperti aula serbaguna dan ruang rapat, Penggunaan AC Split pada ruangan yang tidak membutuhkan AC central dapat menghemat energy, misalnya ruang pengelola, Exhaust adalah sesuatu yang berfungsi sebagai sirkulasi udara, supaya udara tetap bersih dan sejuk. Exhaust digunakan pada ruang-ruang untuk kegiatan servis.



Gambar 32. Penghawaan Buatan
(Sumber: Penulis 2025)

Sistem Pencahayaan Bangunan

1. Pencahayaan Alami



Gambar 33. Pencahayaan Alami
(Sumber: Penulis 2025)

2. Pencahayaan Buatan.

Pencahayaan buatan pada Gedung Mal Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Bombana menggunakan cahaya yang berfungsi pada lampu. Masing masing ruangan di terangi dengan penerangan yang sesuai dengan peruntukannya masing masing.

Sistem Utilitas

1. Sistem Sanitasi dan Jaringan Air

a. Jaringan Air Bersih

Sistem penyediaan air bersih menggunakan dua sumber utama:

- 1) PDAM (sumber utama).
- 2) Pengolahan Air Hujan (*Rainwater Harvesting*) yang ditampung di roof site atau tandon, digunakan khusus untuk kebutuhan non-konsumsi (seperti *flushing toilet* dan penyiraman taman).
- 3) Sistem Jaringan: Menggunakan sistem tertutup (*closed system*). Pipa PVC AW untuk instalasi luar dan PPR (tahan panas/tekanan) untuk instalasi dalam. Dilengkapi *gate valve* dan *non-return valve* untuk pengendalian.
- 4) Tekanan: Menggunakan pompa dorong (*booster pump*) untuk menjamin tekanan yang cukup, terutama untuk lantai atas.

b. Sistem Jaringan Air Kotor

Jaringan air limbah dipisahkan menjadi dua jenis dengan penanganan yang berbeda:

- 1) Limbah Cair (*Grey Water*): Berasal dari wastafel, keran, shower. Dialirkan menuju IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) atau WWTP (*Waste Water Treatment Plant*).
- 2) Limbah Padat (*Black Water*): Berasal dari kloset, bidet/urinoir. Dialirkan menuju STP (*Sewage Treatment Plant*) untuk diolah atau dibuang keluar.

- 3) Air Hujan: Dialirkan langsung ke got besar dan diteruskan ke riol/saluran pembuangan kota.

2. Konsep Jaringan Listrik

Pasokan listrik dijamin melalui sistem dual-source (dua sumber) untuk mencegah pemadaman:

- a. PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai sumber utama.
- b. Genset (*Generator Set*) sebagai sumber cadangan yang bekerja secara otomatis (*otomatis transfer switch*) saat sambungan PLN terputus.

3. Analisis Keamanan Bangunan

Sistem keamanan dan keselamatan kebakaran terbagi menjadi pencegahan aktif dan pasif, serta sistem perlindungan umum.

a. Sistem Pemadam Kebakaran (Aktif)

- 1) Luar Bangunan: Menggunakan *pilar hydrant*.
- 2) Dalam Bangunan: Menggunakan *fire alarm system* dan *fire hydrant system*.

b. Pencegahan Pasif dan Evakuasi

- 1) Pintu Kebakaran: Harus dapat menutup otomatis, mudah dibuka, dan memiliki ketahanan api selama 1-3 jam. Bukaan pintu mengarah ke tangga, kecuali lantai dasar yang mengarah ke luar bangunan/lobby.
- 2) Tangga Darurat: Didesain kedap asap, dilengkapi penerangan darurat dan exhaust fan. Jarak pencapaian maksimal 25 m dengan lebar tangga minimal 1,2 m.
- 3) Sistem Jalur Evakuasi: Jalur khusus yang bebas hambatan, minimal 1,2 m lebarnya, dilengkapi rambu yang menyala (*phosphorescent/lampu darurat*), dan mengarah ke titik kumpul (*assembly point*) yang aman.

c. Perlindungan Bangunan

- 1) Penangkal Petir: Menggunakan jenis Early Streamer Emission (ESE) untuk memancarkan muatan positif sebelum sambaran, meningkatkan efektivitas perlindungan.
- 2) CCTV: Sistem pengawasan visual (Closed Circuit Television) digunakan untuk memantau dan merekam aktivitas, meningkatkan keamanan dan pengawasan di area publik dan terbatas.

d. Aksesibilitas Bangunan

Aksesibilitas diintegrasikan sebagai bagian dari keamanan dan kenyamanan bagi semua

pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan orang berkebutuhan khusus, melalui penyediaan:

- 1) Ramp dengan railing (pagar pembatas).
- 2) Toilet khusus disabilitas.
- 3) Jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses.
- 4) Sistem bukaan pintu otomatis.

4. Analisis Transportasi Vertikal

Transportasi vertikal dibedakan berdasarkan penggunaannya, berfokus pada keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas:

a. Tangga

Berfungsi sebagai penghubung lantai dan jalur evakuasi darurat. Harus memenuhi standar keselamatan (lebar, tinggi tapak, antislip), tahan api, dilengkapi penerangan darurat, dan memiliki handrail (pegangan tangan) di kedua sisi.

b. Ramp

Dirancang khusus sebagai penghubung lantai untuk kemudahan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, lansia, dan orang yang membawa barang dorong. Ramp juga berfungsi sebagai jalur evakuasi alternatif yang lebih aman saat keadaan darurat.

Hasil Perancangan



Gambar 34. Eksterior Bangunan
(Sumber: Penulis 2025)

Gambar 34 menampilkan tampilan eksterior Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana yang mengusung pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular dengan transformasi bentuk rumah adat Moronene. Massa bangunan dirancang simetris dan monumental, dengan komposisi atap yang merepresentasikan elemen *tonto* (kaki), *botono* (badan), dan *pea* (kepala). Fasad memadukan material modern seperti ACP dan kaca *tempered* dengan sentuhan ornamen lokal, sehingga menghasilkan kesan representatif, terbuka, dan kontekstual terhadap identitas budaya daerah. Area plaza dan lanskap di bagian depan bangunan memperkuat karakter bangunan sebagai ruang publik yang inklusif dan mudah diakses.



Gambar 35. Aerial View Bangunan
(Sumber: Penulis 2025)

Gambar di atas memperlihatkan pandangan udara (*aerial view*) keseluruhan kawasan Mal Pelayanan Publik yang menunjukkan tata letak massa bangunan terhadap tapak seluas $\pm 2,9$ Ha. Terlihat komposisi zoning yang jelas antara area bangunan utama, ruang terbuka hijau, area parkir, serta sirkulasi kendaraan dan pedestrian. Tata massa dirancang dengan mempertimbangkan orientasi matahari, arah angin, serta akses utama dari jalan arteri, sehingga menghasilkan perencanaan tapak yang efisien dan responsif terhadap kondisi lingkungan. Proporsi ruang terbuka yang dominan mencerminkan pemenuhan KDH serta konsep keberlanjutan kawasan.



Gambar 36. Interior Ruang Pelayanan Publik
(Sumber: Penulis 2025)

Gambar di atas menampilkan interior ruang pelayanan publik yang dirancang dengan konsep *open space* untuk menciptakan alur pelayanan yang sistematis dan mudah dipahami pengunjung. Penataan loket tersusun rapi dengan sirkulasi linear yang mengarahkan pengguna dari area tunggu menuju area pelayanan tanpa konflik pergerakan. Penggunaan pencahayaan alami melalui bukaan besar serta pencahayaan buatan yang merata memberikan suasana terang dan nyaman. Elemen interior mengadopsi warna netral modern yang dipadukan dengan aksesoris motif lokal sebagai representasi identitas Moronene dalam ruang pelayanan yang formal dan profesional.

Gambar 37 memperlihatkan ruang rapat yang dirancang sebagai ruang semi-privat dengan suasana formal namun tetap nyaman. Tata letak meja dan kursi disusun terpusat untuk mendukung komunikasi efektif antar peserta

rapat. Ruang ini memanfaatkan sistem pencahayaan buatan yang terfokus serta penghawaan buatan untuk menjaga kenyamanan termal selama kegiatan berlangsung. Elemen desain interior tetap mengadopsi pendekatan Neo-Vernakular secara subtil melalui pemilihan material dan detail visual, sehingga ruang rapat tidak hanya berfungsi sebagai ruang koordinasi, tetapi juga tetap merefleksikan identitas arsitektur bangunan secara keseluruhan.



Gambar 37. Ruang Rapat
(Sumber: Penulis 2025)

KESIMPULAN

Perancangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang efisien, representatif, dan berakar pada budaya lokal. Bangunan dirancang dengan pendekatan arsitektur Neo-Vernakular, mengadaptasi bentuk rumah adat Moronene (*Tonto, Boto, Pea*) menjadi massa bangunan simbolis. Perancangan spasial menerapkan zoning publik, semi publik, privat, dan servis, dengan material modern yang diselarasakan ornamen lokal. Sistem utilitas memperhatikan penghawaan dan pencahayaan alami, air bersih dan limbah, serta keamanan kebakaran. Lanskap dan ruang luar diintegrasikan dengan elemen hijau, furniture, dan jalur pedestrian ramah pengguna.

Perancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperdalam aspek keberlanjutan lingkungan agar bangunan lebih ramah energi dan efisien secara jangka panjang. Selain itu, penting untuk menyiapkan dokumen teknis lanjutan seperti RAB, RKS, dan perencanaan struktur oleh tenaga profesional untuk memastikan realisasi bangunan sesuai dengan standar konstruksi. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada evaluasi implementasi MPP sejenis di daerah lain sebagai tolak ukur performa desain ini di masa depan. Akhirnya,

desain ini diharapkan mampu menginspirasi pembangunan fasilitas publik lainnya yang menghargai budaya lokal namun tetap fungsional dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus La Ode Muhammad, Umar Muhammad Zakaria, & Dahrma I Made Krisna Adhi. (2022). *Mal Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Arsitektur Nusantara di Kabupaten Muna. Volume 7 No. 1*, 20–25.
- Angelina, M., Shintany, A., Maringka, B., Nelza, M., Iqbal, M., Arsitektur, M. P., Sipil, F. T., Perencanaan, D., & Malang, I. (n.d.). *Mal Pelayanan Publik di Kota Palangkaraya* Tema: *Arsitektur Neo Vernakular*.
- MPP Kab. Bombana. (2021). *UPTD Mal Pelayanan Publik*. <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>
- BPS Kabupaten Bombana. (2021). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana.
- Goldra, G., & Prayogi, L. (2021). Konsep Arsitektur Neo Vernakular pada Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda. *Jurnal Linears*, 4(1), 36–42. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i1.5190>
- Hamasi Jarsul A., Kadir I., & Ramadhan S. (2002). *Studi Karakteristik Hunian Pada Wilayah Adat Moronene Kampo Hukaea Laea Kabupaten Bombana*. 40–49.
- Indra Yudha Pamungkas, F., & Bintarjo, B. D. (2022). Penerapan Pendekatan Neo Vernakular Pada Redesain wisata Sanggraloka Telaga Giri wana Tirta di Gresik. In *Prosiding Senakama* (Vol. 1).
- Nur'asia, & Anisa. (2024). *Kajian Konsep Arsitektur Neo Vernakular Pada Bangunan Kebudayaan Kasus Bangunan Sasana Kriya*.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta.
- Putri Jaya Betari, K., Abdullah Arif, A., Prodi Arsitektur, M., Arsitektur dan Perencanaan, J., Kunci, K., Bupati, K., & Neo Vernakular, A. (2021). *Penerapan Konsep Arsitektur Neo Vernakular pada Perancangan Kantor Bupati Kabupaten Pidie* (Vol. 5, Issue 1).
- Pynkyawati, T., Aripin Samsul, Iliyasa Eri, Ningsih Leslye Yunita, & Amri. (2014). Kajian Efisiensi Desain Sirkulasi pada Fungsi Bangunan Mall Dan Hotel BTC. In *Jurnal Reka Karsa ©Teknik Arsitektur Itenas* | (Vol. 2, Issue 1).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, Jakarta*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik, Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, Jakarta*.
- Riyadi Kharisma. (2021). *Perancangan Ruang Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes*.
- Sari., R. , S. (2022). *Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu raya*.
- Widi, C., & Prayogi, L. (2020). Penerapan Arsitektur Neo-Vernakular pada Bangunan Budaya dan Hiburan. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 3(3), 282–290. <https://doi.org/10.17509/jaz.v3i3.23761>